



STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL LOMBOK: PELUANG, TANTANGAN, NILAI KOMPETITIF YANG DIMILIKI

Revina Amanda Putri^{1*} Aisyah Amirah Yasmin² M. Hiqmah Ameirindo³ Anggia Quamella Hanovi⁴ Ida Erlinda⁵ Adhi Setya Putra⁶ Acep Unang Rahayu⁷ Sukmadi⁸ Haryadi Darmawan⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Magister Terapan Pariwisata Politeknik Pariwisata NHI Bandung

Email Korespondensi*: amandaputrirevena@gmail.com

Abstrak

Konsep pariwisata Halal dapat diterapkan pada berbagai lokasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk bermayoritas menganut agama islam, menjadi lokasi yang memenuhi syarat utamanya. Melalui pariwisata, Indonesia dikenal oleh seluruh dunia. Kebutuhan pariwisata yang beraneka ragam memunculkan konsep pariwisata baru. Salah satunya adalah konsep pariwisata ramah muslim. Pada Indonesia, konsep ini diterapkan khususnya di daerah Lombok. Penerapannya di Lombok didukung dengan perkembangan pariwisata yang berkelanjutan serta dukungan pemerintah didalamnya. Dengan metode kualitatif, peneliti menjalankan rangkaian kegiatan dan memaparkan hasil temuan baik dalam bentuk data maupun naratif. Pengumpulan data dilaksanakan baik untuk data primer maupun sekunder dibantu dengan proses dokumentasi dan diolah dengan teknik triangulasi data. Temuan pada beberapa lokus dilihat dari berbagai sudut pandang yang menghasilkan kesimpulan berupa peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan ini dapat dijadikan sebagai dasar penilaian mandiri guna mempersiapkan Lombok dalam persaingan yang lebih besar baik menghadapi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Kata Kunci: Pariwisata, Pariwisata Halal, Pengembangan Pariwisata

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, warga muslim di Indonesia sebanyak 87,18%, sedangkan lainnya beragama Kristen (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69), Budha (0,72) dan sisanya menganut agama yang lain (BPS, 2010). Potensi ini dimanfaatkan Indonesia

untuk terus berupaya mengembangkan jenis wisata halal (*halal tourism*). Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang sangat strategis. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini memiliki berbagai kekayaan flora dan fauna. Biodiversitas yang tinggi ini menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara tujuan wisata. Produk wisata yang ditawarkan dikelompokkan



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

dalam tiga hal yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan (Widagdyo, 2015). Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata lainnya pemerintah mulai mengembangkan wisata halal (halal tourism). Tahu dan sadar mengenai produk halal dapat mengarahkan peningkatan pada pertumbuhan industri halal (Hamdan et al., 2013). Industri halal yang mengalami peningkatan kemudian memunculkan wisata halal (*halal tourism*). Halal tourism kemudian menjadi fenomena baru bagi pariwisata. (Samori et al., 2016). Fenomena ini mendapatkan dukungan dan menjadi bahasan dalam literatur terpublikasi yang memuat penjelasan mengenai perilaku wisatawan yang beragama Islam ternyata memiliki kepedulian besar terhadap pola konsumsi produk juga layanan yang diharapkan sesuai dengan syariah Islam ketika melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata (Jafari dan Scott, 2014).

Peningkatan terjadi bagi minat wisatawan akan adanya wisata halal (*halal tourism*) yang mengalami peningkatan pertumbuhan (Battour dan Ismail, 2016). Adanya peningkatan pertumbuhan wisata

halal yang terjadi, diiringi pula dengan peningkatan jumlah wisatawan beragama Islam setiap tahunnya (Yusof & Shutto, 2014; El-Gohary, 2016; Henderson, 2016). Indonesia berupaya menambah jumlah hotel syariah yang ada. Pemerintah mengatur dengan Peraturan MENPAREKRAF Republik Indonesia dalam Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah. Prinsip Islam yang sesuai aturan atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan maksud dari hukum Syariah. Secara umum, kebanyakan makanan maupun minuman yang beredar di negara Indonesia telah disertifikasi halal oleh organisasi yang mewadahi para ulama, zuama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia, MUI.

Sertifikasi dibuktikan dengan penyantunan logo halal dari MUI pada kemasan produk. Selain sertifikasi halal, dilakukan juga pemeriksaan oleh badan pengawas yang memeriksa obat-obatan dan makanan (BPOM) yang kemudian menjadi penentu bahwa produk makanan maupun prodik minuman yang beredar di Indonesia telah dijamin status halalnya untuk dikonsumsi masyarakat maupun



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

wisatawan beragama Islam. Hal itu juga berlaku untuk para wisatawan yang bukan beragama Islam, hal ini bisa menjadi penentu bahwa zat yang terkandung di dalam produk makanan maupun produk minuman yang ada sudah adalah zat yang terjamin aman dan layak konsumsi (Jaelani, 2017). Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan jenis wisata halal (*halal tourism*), sebagai contoh yakni KEMENPAREKRAF yang memiliki hubungan kerja bersama Dewan Syariah Nasional (DSN), juga MUI bersama Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).

Bentuk nyata hubungan kerjasama yang terjalin terlihat pada pengembangan pariwisata yang mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama yang tertuang dalam PERMENPAREKRAF (Jaelani, 2017). Kementerian Pariwisata (2015) melaporkan bahwa tersedia tiga belas provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki kesiapan dalam pembentukan destinasi yang mengedepankan wisata halal (*halal tourism*) sebagai nilai utamanya. Provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Aceh, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi

DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Provinsi Bali. NTB adalah provinsi di Indonesia yang dikenal telah melakukan pengembangan bagi wisata halal untuk para pelancong beragama Islam dalam taraf internasional dengan baik. Pada tahun 2016, Pemerintah provinsi NTB melakukan kerjasama dengan MUI, LPPOM, serta DISBUDPAR bersama UMKM untuk melakukan pemberian lisensi halal pada restoran dalam hotel, restoran di luar hotel, rumah makan, juga UMKM.

Terdapat catatan bahwa ada sejumlah 644 buah lisensi halal yang telah terbit. Selain makanan halal, tersedianya fasilitas sebagai sarana ibadah juga dengan mudah ditemui di NTB. NTB yang merupakan daerah berpopulasi muslim hingga 90% dari jumlah penduduknya, memiliki 4.500 masjid yang berdiri dan berada pada 598 desa dan kelurahan. NTB pun memiliki julukan sebagai pulau seribu masjid. Indonesia mengusahakan upaya promosi *halal tourism* yang dimiliki kepada khalayak internasional. Upaya ini



dilakukan melalui ajang World Halal Tourism yang terlaksana di Abu Dhabi pada tahun 2016. Sektor pariwisata memainkan peran penting bagi perputaran ekonomi dunia dan dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara, selain itu pariwisata juga bisa dipandang sebagai salah satu sumber terpenting penghasil Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan wisatawan muslim menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan pariwisata.

Tercantum dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tahun 2023 dengan hasil menyoroti provinsi yang berhasil mencapai posisi destinasi unggulan bagi wisatawan muslim. Peringkat nomor satu adalah Nusa Tenggara Barat dengan skor sebesar 67, nomor dua Aceh, nomor tiga Sumatera Barat, dilanjutkan DKI Jakarta pada posisi ke-empat, dan Jawa Tengah di posisi ke-lima. Penyebab kelima provinsi ini unggul bukan hanya karena penyediaan pilihan Halal saja, melainkan juga karena dapat menghadirkan lingkungan perjalanan holistik guna memenuhi berbagai aspek yang dibutuhkan oleh mayoritas wisatawan

Muslim. Keberhasilan provinsi-provinsi ini tidak lepas dari komitmen mereka dalam menciptakan pengalaman perjalanan yang komprehensif dan inklusif. Strategi komunikasi mereka yang kuat memastikan bahwa penawaran unik mereka tidak hanya diartikulasikan dengan baik tetapi juga secara efektif menjangkau audiens yang dituju. Selain itu, investasi di bidang infrastruktur, seperti jaringan jalan dan layanan transportasi, telah memainkan peran penting dalam memastikan kemudahan aksesibilitas bagi pengunjung. Penekanan pada penciptaan lingkungan yang reseptif dan inklusif, dilengkapi dengan beragam layanan yang disesuaikan untuk wisatawan Muslim, menjadikan mereka sebagai tolok ukur pariwisata halal di Indonesia.

Namun ada yang menarik semenjak berkembangnya kawasan Mandalika membuat pariwisata Lombok sudah mulai berkembang ke arah Sport Tourism. Kuta Mandalika Lombok yang kemudian ditetapkan sebagai tujuan pariwisata prioritas nasional oleh Pemerintah Indonesia mengemban harapan akan adanya dampak positif bagi daerah yang ada di sekitarnya. Kebanyakan studi yang



dilakukan selama ini berfokus hanya pada kepuasan wisatawan ataupun dikenal dengan *service quality*. Pendekatan yang dilakukan untuk menguji niat berkunjung wisatawan masih bisa dikatakan jarang dilakukan, terlebih lagi Kawasan Kuta Mandalika Lombok yang saat ini telah menerima penetapan sebagai tujuan pariwisata prioritas Nasional. Tim penulis berharap dengan mengetahui komponen yang menyebabkan wisatawan dalam pembuatan keputusan wisatawan mengunjungi Kawasan Kuta Mandalika Lombok yang dikenal sebagai tujuan wisata prioritas nasional, akan bermanfaat bagi para *stakeholders* yang memiliki peranan di Provinsi NTB (Tantra, 2022).

LANDASAN TEORI

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu bentuk industri yang memiliki dampak bagi perkembangan lingkungan, ekonomi dan sosial. Pariwisata adalah satu dari sekian bentuk industri model baru yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara cepat, hal ini terbukti dengan berkembangnya kesempatan kerja,

pendapatan, taraf hidup masyarakat, dan aktivasi bidang produksi lain di dalam negara yang menerima kunjungan dari wisatawan (Fitriana, 2018). Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 menyatakan bahwa pariwisata merupakan segala aktivitas wisata dan mendapatkan dukungan dari berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, serta peran masyarakat. Pariwisata dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan tidak terbatas. Banyak ahli pariwisata yang menyatakan definisinya mengenai pariwisata dari berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, meskipun dalam sudut pandang yang berbeda namun memiliki arti yang relatif sama.

2. Pariwisata Halal

Definisi Pariwisata Halal yang diungkapkan dalam PERDA Provinsi NTB No. 2 tahun 2016 tentang definisi Pariwisata Halal yang berbunyi: “Kegiatan kunjungan wisata ke destinasi maupun industri pariwisata lainnya yang mampu menyiapkan fasilitas, produk, pelayanan, juga pengelolaan pariwisata sesuai dengan Syari’ah Islam.



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

Maksudnya, kegiatan ini tidak menentang sama sekali aturan yang berlaku bagi umat Islam. Konsep wisata halal adalah bentuk aktualisasi dari konsep Islam yakni adanya ketentuan halal maupun haram sebagai dasar boleh dan tidaknya sesuatu dikerjakan atau diadakan. Seluruh aspek kegiatan wisata dalam kaitannya dengan konsep wisata halal pun tervalidasi berdasarkan adanya lisensi halal sebagai acuan wajib untuk dilakukan seluruh pelaku pariwisata (Chookaew et al. 2015).

Sampai dengan saat ini, belum ditemukan falsafah maupun ketentuan baku yang berlaku bagi wisata halal yang disepakati. Literatur maupun praktisi pun belum banyak yang membahas mengenai falsafah dan ketentuan yang dimaksud (El-Gohary, 2016). Berikut ini adalah kumpulan ketentuan mengenai diadakannya wisata halal dari berbagai sumber:

1. Makanan harus halal,
2. tidak boleh tersedia minuman keras (mengandung alkohol),
3. dilarang menyajikan produk dengan bahan asal hewan babi,

4. tidak diperkenankan adanya diskotik,
5. tamu pria berurusan dengan pegawai pria,
6. dan staf wanita khusus mengurus tamu Wanita,
7. hiburan yang sopan dan secukupnya,
8. tersedianya fasilitas ruang ibadah (baik masjid atau mushalla) dengan pemisahan area antar gender,
9. pakaian islami menutup aurat untuk dikenakan staf sebagai seragam,
10. menyediakan Al-Quran dan alat ibadah (shalat) di kamar,
11. adanya penunjuk kiblat,
12. karya seni yang dihadirkan tidak boleh berupa bentuk manusia,
13. posisi toilet tidak menghadap kiblat,
14. menggunakan cara transaksi keuangan secara syari'ah,
15. hotel maupun usaha wisata lainnya perlu menjalani dasar-dasar zakat.

Apabila diperhatikan dengan rinci, ketentuan baku bagi wisata halal



yang telah disebutkan dapat berseberangan dengan berbagai kepentingan lain, khususnya bersinggungan dengan negara non-Islam yang melakukan pengembangan bagi wisata halal. Dengan demikian dikatakan bahwa diskusi dan kajian yang mendalam mengenai hal tersebut sangat diperlukan, yang melibatkan periset, penyelenggara, maupun pemuka agama.

Namun demikian, bersumber dari ketentuan mengenai wisata halal yang telah dikemukakan, beberapa hal seperti ketersediaan makanan yang seluruhnya halal, tidak hadirnya produk berbahan dasar hewan babi, tidak disediakan minuman keras, menjamin adanya fasilitas ruang ibadah, disediakan kitab suci dan perlengkapan untuk melakukan ibadah (shalat) di kamar, penunjuk kiblat, serta seragam petugas yang sopan dan menutup aurat merupakan elemen terpenting untuk disediakan kepada wisatawan *halal tourism* (The World Halal Travel Summit, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dikaji pada penelitian ini terbagi dalam data primer yang dikumpulkan dengan mengobservasi langsung obyek yang diteliti dan keterangan yang disampaikan Pemerintah Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Pihak pengelola ITDC, Pengelola Kawasan Geopark Kaki Gunung Rinjani, Rumah Makan Kebon Radja. Disamping data primer, data sekunder pun turut hadir berupa dokumen, berbagai terbitan, juga literatur bersumber buku-buku, media cetak maupun digital yang membahas mengenai pariwisata halal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan saat melakukan penelitian ini adalah berupa catatan hasil observasi dan kunjungan pada beberapa lokasi wisata halal di Lombok berikut ini: (a) Dinas Pariwisata NTB, (b) Kawasan Sirkuit Mandalika, ITDC (c) Kawasan Geopark Kaki Gunung Rinjani (d) Rumah Makan Kebon Radja. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa peraturan dan fakta yang terkait langsung dengan wisata halal (documentation). Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini



menggunakan model interaktif dengan 3 fokus utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas halal yang selama ini tercantum hanya berlaku bagi produk makanan, produk minuman, bumbu masak, dan kosmetik. Wisata halal merupakan aktivitas baru yang mengemban harapan sebagai pembelaan dan pelurusan terhadap aktivitas pariwisata yang religius dan memiliki nilai kesinambungan. pengembangan wisata halal di Lombok mendapat momentum dengan penerimaan penghargaan di *World halal Travel Summit 2015* yang mengakselerasi perkembangan wisata halal faktor kunci keberhasilan pariwisata halal di NTB adalah fokus inovatif dan memiliki *branding*. *Trend* industri halal di NTB pertama sekali dikembangkan pada tahun 2015 dan telah berhasil meraih awards selama 2 tahun berturut-turut dalam kategori *Halal Honeymoon Destination “the Best in The World”*, *Halal Beach Resort “the Best in The World”* dan *Halal Travel Website “the*

Best In The World” pada ajang *World Halal Tourism Awards* di tahun 2015 dan 2016.



Gambar 1. IMTI Awards Lombok

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2023

Grand design wisata halal di Lombok yaitu sebagai berikut yang pertama dasar hukum yang diatur melalui PERGUB nomor 51 tahun 2015. Selain itu ada pula PERDA nomor 2 tahun 2016 dan PERMENPAREKRAF nomor 2 tahun 2014 yang kedua yaitu dengan sosialisasi dan pembagian zonasi destinasi dengan pembagian 4 destinasi wisata halal titik yang pertama Gili tramina, gita nada, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sembalun. Kemudian dalam penataan sarana prasarana dan penguatan SDM yaitu dengan sertifikasi halal fassum pendukung pariwisata (Hotel, restoran dll) dan peningkatan kapasitas



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

SDM melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi ari ketiga poin tersebut akan membangun *brand image* wisata halal yang diharapkan.

Pemerintah berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap wisata halal di Indonesia. Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Badan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dinas Perdagangan dapat bekerja sama untuk memperkenalkan konsep wisata halal dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha perhotelan, usaha café, dan rumah makan. Pembinaan wisata halal dilakukan dalam bentuk diseminasi, advokasi dan bimbingan serta pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan dan penilaian.

Tabel 1. Strategi dan Target Program Pariwisata Halal

No.	Program	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sertifikasi Tour Guide dan Tour Planner Berbahasa Arab (Hospitality)	100	150	200	250	300	350
2	Sertifikasi Restoran Hotel	60	70	85	100	110	120
3	Pelatihan Auditor MUI	20	25	35	50	60	80
4	Pelatihan Pariwisata Halal bagi industri pariwisata	100	200	300	400	500	600

5	Edukasi Sadar Wisata Halal pada masyarakat	100	500	700	900	1200	1500
6	Sertifikasi BPW	-	150	200	250	300	350
7	Sertifikasi rumah makan, restoran non hotel	256	300	325	350	375	400
8	Sertifikasi catering	321	385	390	400	420	430
9	GMTI melakukan Lomba NTB - Halal Tourism Award bagi Industri Pariwisata		1 Muharram				
10	Khazanah Ramadhan dan event lainnya	Bulan Ramadhan					
11	Pengembangan kawasan Halal Tourism		Kota Tua Ampenan (Halal Kuliner) dan Gili Meno (Kawasan Pantai Muslim Friendly)				
12	Promosi Halal Tourism dengan BAS Model	Setiap tahun					

Sumber: Dinas Pariwisata Lombok, 2023

Sesuai dengan tujuan terciptanya *moeslem friendly tourism*, PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal mengatur secara keseluruhan kegiatan industri kepariwisataan di Provinsi NTB. Selain itu hasil observasi yang bersumber Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni oleh Badan Sertifikasi Halal mengenai data sertifikat halal LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 – 2023 menyebutkan bahwa Restoran/Hotel, Katering, UKM sebagai berikut,



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekiparprima.ac.id/index.php/utama>

DATA SERTIFIKAT HALAL
LPPOM MUI PROVINSI NTB TAHUN 2012 S/D 2023

TAHUN	RESTORAN (HOTEL)	RESTORAN NON HOTEL DAN RM	CATERING	UMKM	AMDK	RPH/RPU	KOSMETIK	JUMLAH
2012	6			239				245
2013	1			236				237
2014	2			190				192
2015	5	75		20	75			175
2016	28	1071		262	279			606
2017	7	52		15	847	9	2	432
2018	1	14		10	72	3	1	101
2019	2	8		9	71	3		93
2020		3		4	50	1	3	65
2021	2	3		2	2	3	2	14
2022	1			155			1	156
2023	-	3		90			2	23

Gambar 2. Data Sertifikat Halal

Sumber: Dinas Pariwisata Lombok, 2023

Dari hasil wawancara dengan MUI Nusat Tenggara Barat dari data sertifikat halal diatas banyak restoran, hotel, catering, UMKM yang belum memperpanjang sertifikat halal karena terbentur dengan aturan yang mengharuskan memperpanjang sertifikat halal harus memiliki Sertifikasi Halal BPJPH untuk hotel skala besar. Selain itu data yang didapatkan peneliti dengan mengunjungi beberapa destinasi dikunjungi saat berada di Lombok, antara lain:

1. Desa Sasak Sade

Masyarakat di Desa Sade mayoritas beragama muslim dan telah menerapkan prinsip-prinsip wisata halal udalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan wisatawan Muslim maupun non-muslim. Konsep wisata halal yang tersedia di Desa Sade mencakup ketersediaan makanan halal di lingkungan desa, memiliki fasilitas

ibadah yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual seperti masjid maupun tempat berwudhu yang bersih dan terbebas dari nakjis serta pelayanannya yang ramah.

- 2. KEK Mandalika Lombok
- 3. Santika Hotel Lombok

Hotel Santika sering menjadi tuan rumah acara budaya dan seni, seperti: konser musik, pertunjukkan tari dan pameran seni. Hotel ini berperan dalam mempromosikan dan mendukung kegiatan budaya di Lombok serta memperkenalkan warisan seni tradisional kepada wsisatawan. Hotel Santika merupakan salah satu hotel dengan sertifikasi Halal. Hal ini dijadikan sebagai nilai jual bagi para calon konsumennya.



Gambar 3. Sertifikasi Halal Hotel Santika
Sumber: Hotel Santika, 2023

4. Air Terjun Benang Kelambu dan Stokel



Pada destinasi ini, memiliki aturan berpakaian yang harus diterapkan mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila didapati wisatawan yang mengenakan pakaian minim, maka akan didipinjami kain penutup tambahan. Layanan ojek lokal juga memiliki aturan tersendiri, dimana penumpang dan pengemudi dilarang lawan jenis. Hal ini merujuk pada aturan-aturan syariat islam.

5. Rumah Makan Taliwang Kebon Radja

Rumah makan Taliwang Kebon Radja terletak di Jl. Ireng Jaya No.9, Jati Sela, Gn. Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Restoran ini dikenal sebagai salah satu tempat makan ayam Taliwang terbaik di Lombok yang berada di tepi sungai yang masih bersih dan rindang, dilengkapi dengan saung yang bersih dan nyaman serta hiasan kaligrafi yang menghiasi setiap sudut restoran. Rumah makan Taliwang Kebon Radja menawarkan masakan khas Lombok dan menyediakan layanan yang baik. Selain itu, rumah makan ini juga menawarkan sebagai restoran halal dengan suasana yang ramah bagi wisatawan.



Gambar 4. RM. Taliwang Kebon Radja

Sumber: Dokumentasi, 2023

6. Gili Trawangan

Fasilitas yang mendukung wisata halal yang terkonfirmasi dalam observasi yang dilakukan pada pariwisata konvensional di Gili Trawangan masih belum banyak ditemukan. Hal tersebut terbukti dengan belum ditemukannya petunjuk menuju Musholla atau Masjid terdekat pada hotel, bungalow, penginapan konvensional lainnya maupun restoran disekitar Gili Trawangan. Ketersediaan penunjuk arah kiblat di kamar di setiap hotel dan penginapan konvensional pun masih belum terpenuhi. Tempat berwudhu masih belum memadai, dilihat berdasarkan fasilitas kamar mandi yang hanya terdapat shower mandi dan wasteful. Dikatakan kurang memadai karena belum memudahkan tamu yang membutuhkan sarana berwudhu. Selain itu masih banyaknya makanan dan minuman yang tidak halal dijual di Gili Trawangan.



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

Peluang Halal Tourism di Lombok	1. Daya tarik pariwisata yang beragam dan sudah berkembang.
	2. Mengembangkan destinasi untuk <i>halal tourism</i> yang terdiri dari wisata budaya (<i>culture</i>), wisata alam (<i>nature</i>), dan wisata buatan (<i>man-made</i>).
	3. Memperkenalkan kekayaan dan keindahan alam kepada wisatawan.
	4. Memberikan kenyamanan bagi turis khususnya kaum muslim
	5. Memperkenalkan kerajinan khas Lombok
	6. Meningkatkan industri pariwisata Indonesia hingga mancanegara khususnya memperkenalkan kuliner berlabel halal khas Lombok
	7. Pilihan destinasi <i>Honeymoon</i>
	8. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi wisatawan, meningkatkan sumber daya manusia profesional
Tantangan Halal Tourism di Lombok	1. Mulai pudarnya ikon Lombok sebagai destinasi wisata halal
	2. Lemahnya <i>branding</i> dan promosi sebagai <i>muslim friendly destination</i>
	3. Kendala Aksesibilitas
	4. Perkembangan kawasan Mandalika menjadi wisata halal hanya sebatas pendukung perkembangan wisata di Lombok
	5. Minim edukasi bagi masyarakat lokal mengenai wisata halal
	6. Mahalnya harga tiket pesawat menuju Lombok

Gambar 4. Paparan Peluang dan Tantangan

Sumber: Olah Data, 2023

Pemaparan gambar dapat diikuti informasi untuk memudahkan pembaca memahami uraian yang dipaparkan

KESIMPULAN

Pariwisata halal di Indonesia, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan

meningkatnya minat dan kesadaran wisatawan beragama Islam untuk mengonsumsi produk dan merasakan layanan yang sesuai dengan syariah. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai instansi, berupaya keras dalam mengembangkan potensi pariwisata halal untuk memanfaatkan mayoritas penduduk muslim di negara ini. Konsep wisata halal di Lombok tidak saja berfokus kepada aspek kehalalan makanan, melainkan juga pada penyediaan fasilitas ibadah, pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas, juga peningkatan kemampuan dan pemberdayaan SDM. Penerapan konsep ini dilakukan melalui berbagai program, termasuk pelatihan, sertifikasi, dan promosi destinasi wisata halal.

Penghargaan dan pengakuan internasional, seperti penghargaan dalam ajang World Halal Tourism Awards, serta peringkat terbaik pertama Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2023, menjadi bukti kesuksesan upaya pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bukan hanya menjadi sebuah



fenomena baru, tetapi juga sebuah peluang ekonomi yang besar bagi Indonesia. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, wisata halal dapat terus tumbuh dan menghadirkan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi maupun lapangan kerja di daerah tersebut.

REFERENSI

- Chookaew, S., Chanim, O., Charatarawat J., Sriprasert, P., & Nimpaya, 2015. Increasing Halal Tourism Potential at Andalan Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal Economic, Bussiness and Management*, 3(7), 277-279.
- El-Gohary, H. 2016. Halal tourism, is it really Halal?. *Tourism Management Perspectives*, 19, 124-130.
- Fitriana, W. D. 2018. Digitalisasi Kuliner dan Wisata Halal Daerah Jombang Melalui Aplikasi “Jombang Halal Tourism”. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 108-116.
- Hamdan, H., Issa, Z. M., Abu, N., & Jusoff, K. 2013. Purchasing decisions among Muslim consumers of processed halal food products. *Journal of Food Products Marketing*, 19(1), 54-61.
- Henderson, J. C. 2016. Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160-164.
- Jaelani, A. 2017. Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of management and Marketing*, 7(3), 25-34.
- Jafari, J., & Scott, N. 2014. Muslim world and its tourisms. *Annals of Tourism Research*, 44, 1-19.
- Kemenparekraf. 2018. Indonesia Muslim Travel Index 2018.
- Kemenparekraf. 2019. Indonesia Muslim Travel Index 2019.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal
- Samori, Z., Salleh, N. Z. M., & Khalid, M. M. 2016. Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131-136.
- Tantra, T., Zuliestiana, D. A., & Padmadikara, A. 2022. Factors influencing tourists' visitation to



Belitung Island as a national priority destination. In *Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0* (pp. 164-170).

Widagdyo, K. G. 2015. Analisis pasar pariwisata halal indonesia. *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 73-80.

Yusof, S. M., & Shutto, N. 2014. The development of halal food market in Japan: An exploratory study. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 253-261.